

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemampuan membaca sering kali disebut dengan literasi, tetapi tidak semua literasi membahas tentang menulis dan membaca saja. Didalam kehidupan bermasyarakat literasi adalah kemampuan dalam memberikan penilaian atas informasi yang sedang berkembang ditengah masyarakat khususnya bidang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Ambar Teguh S, pemberdayaan tidak bersifat selamanya tetapi sampai masyarakat mampu untuk mandiri dan jika dilihat dari pendapat tersebut, pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. program pemberdayaan masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan desa (perdes) agar terwujud perdes yang aspiratif dilakukan dengan dasar bahwa setiap warga desa berhak menyampaikan pendapat, masukan, saran, baik secara lisan maupun tertulis, untuk disampaikan dan dibahas dalam musyawarah desa (Musdes). Mengingat pentingnya peran musdes dalam penyusunan peraturan desa diperlukannya hubungan komunikasi

yang baik antara pemerintahan desa dengan masyarakat agar membawa dampak bagi keberhasilan pemberdayaan melalui program kerja administrasi pemerintahan desa.¹

Faktor yang membuat masyarakat kurang nya literasi di sebabkan oleh tingkat partisipasi masyarakat desa dalam musyawarah tidak menjadi prioritas.masyarakat hanya dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan, hal tersebut karena masih banyak penilaian dari masyarakat bahwa kegiatan ini tidak membawa dampak bagi kehidupan sehari-hari mereka dan masih banyak yang perlu dikerjakan untuk mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga,dibandingkan ikut berpartisipasi dalam pembuatan peraturan Desa. Rendah nya tingkat pendidikan serta kurangnya fasilitas yang ada juga berpengaruh pada keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Gerakan literasi pemberdayaan masyarakat desa melalui program kerja administrasi pemerintahan desa dimulai dari upaya bina manusia (mengembangkan kemampuan sumber daya manusia), Bina Usaha (memegang peran penting dalam perbaikan kesejahteraan), Bina Lingkungan (mengurus sumber daya alam dan lingkungan hidup), Bina Kelembagaan (mampu memahami konsep organisasi dan strukturnya) dan memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengembangkan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera.²

Mengingat literasi itu Sangat penting untuk itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi: meningkatkan literasi pemberdayaan masyarakat melalui program kerja administrasi pemerintahan desa pangkalan lungung kecamatan kwaluh leidong kabupaten labuhanbatu utara.

¹ UU RI NO.6 Tahun 2014 : Peraturan lengkap desa h.3

²Sunyoto Usman,Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat,Yogyakarta: Pustaka Belajar,2010,hlm.31

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya literasi pemberdayaan masyarakat dalam program kerja pemerintahan desa pangkalan lunang kecamatan kualuh leidong kabupaten labuhanbatu utara.
2. Belum terpenuhinya literasi pemberdayaan masyarakat melalui program kerja Pemerintahan desa pangkalan lunang kecamatan kualuh leidong kabupaten labuhanbatu utara.
3. Apa faktor-faktor yang membuat literasi pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan baik?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di susun tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan literasi serta mampu menjaga kelestarian budaya literasi melalui pemberdayaan masyarakat dan di usulkan dalam program kerja Pemerintahan Desa pangkalan lunang Kecamatan kualuh leidong Kabupaten LabuhanBatu Utara.

b. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian adalah dengan literasi melalui program pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan tujuan yang berdaya guna serta tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menuju desa mandiri.

Manfaat lainnya dibagi secara teoritis dan praktis, Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi atau karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian kebijakan pemerintahan desa.

2. Secara praktis

a. bagi pemerintahan desa

Desa pangkalan lunang kecamatan kualuh leidong kabupaten labuhanbatu utara, sebagai informasi dan masukan untuk dapat mempertahankan maupun meningkatkan literasi melalui pemberdayaan kepada masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat bagi masyarakat tentang literasi pemberdayaan masyarakat melalui program kerja pemerintahan desa.

c. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara.

d. Bagi Fisip Uisu

Untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip di universitas islam sumatera utara (UISU).

D. Kerangka Teori

A. Literasi

Secara umum, literasi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Seseorang dikatakan literasi apabila ia memiliki pengetahuan dalam setiap aktivitas yang menuntut fungsi secara efektif dalam masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh melalui membaca dan menulis dapat dimanfaatkan bagi diri sendiri dan kemajuan bangsa. Literasi menjadikan manusia berfungsi maksimal dalam bermasyarakat. Kemampuan dan keberanian untuk memecahkan masalah melalui kegiatan berpikir kritis dan berbudaya. Masyarakat yang berbudaya adalah masyarakat yang menanamkan nilai-nilai positif sebagai upaya menggunakan kemampuan dirinya terbentuk melalui pemikiran yang berarti aktivitas menemukan dan membangun makna hidup, Hal ini dapat dicapai melalui penguasaan literasi yang baik.³

Literasi sangat penting didalam masyarakat karena mampu menambah wawasan, kecerdasan, serta keahlian untuk menjalankan dan mengembangkan kehidupannya. Dengan adanya literasi maka masyarakat mampu mensejahterakan dan merumuskan program-program untuk pembangunan desa. Bukan hanya masyarakat tetapi pemerintahan desa juga terlibat dalam menjalankan literasi melalui media membaca, sosialisasi yang diadakan pemerintahan desa, fasilitas teknologi, dan pelatihan - pelatihan untuk menambah kemampuan masyarakat.⁴

³ Permendikbud, Pedoman Pelaksanaan Gerakan Literasi Nasional, (pusat badan pembinaan dan pembangunan bangsa kementerian pendidikan dan kebudayaan: 2006), h. 8.

⁴ Irianto, putri oviliolanda, lifia yola febrianti. jurnal: "pentingnya penguasaan literasi bagi generasi muda dalam menghadapi masa" (Bandung: universitas pendidikan Indonesia. 2017), Hal. 640-642.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. desa berkewajiban untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun masyarakat desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi, dan mengawasi serta menyampaikan aspirasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa di dalam program pembangunan diharuskan melakukan pemberdayaan masyarakat. Apabila pemerintah desa tidak melakukan program pemberdayaan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya untuk mendorong terciptanya program pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa.⁵

Pemberdayaan ini menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai proses mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya. Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.⁶

⁵ peraturan lengkap desa (UU RI NO. 6 tahun 2014).sinar grafika.hlm.31

⁶ Prayitno, ujiangi singgih.anih sri suryani,dkk.jurnal:”pemberdayaan masyarakat “(jakarta pusat.azza grafika).hlm.4-6

C. Program Kerja Administrasi Dan Kebijakan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya ada kegiatan administrasi. Administrasi dalam arti luas adalah proses kolaboratif dari dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengertian administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan mencatat, menyurat, mengetik, dan lain-lain atau dapat dikatakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan di desa disebut administrasi pemerintahan desa. Berdasarkan Permendagri No.47 Tahun 2016, penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi tentang pemerintahan desa dalam buku register desa. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan pengertian yang sempit dari segi administrasi. Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri atas beberapa administrasi yaitu: administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya.⁷

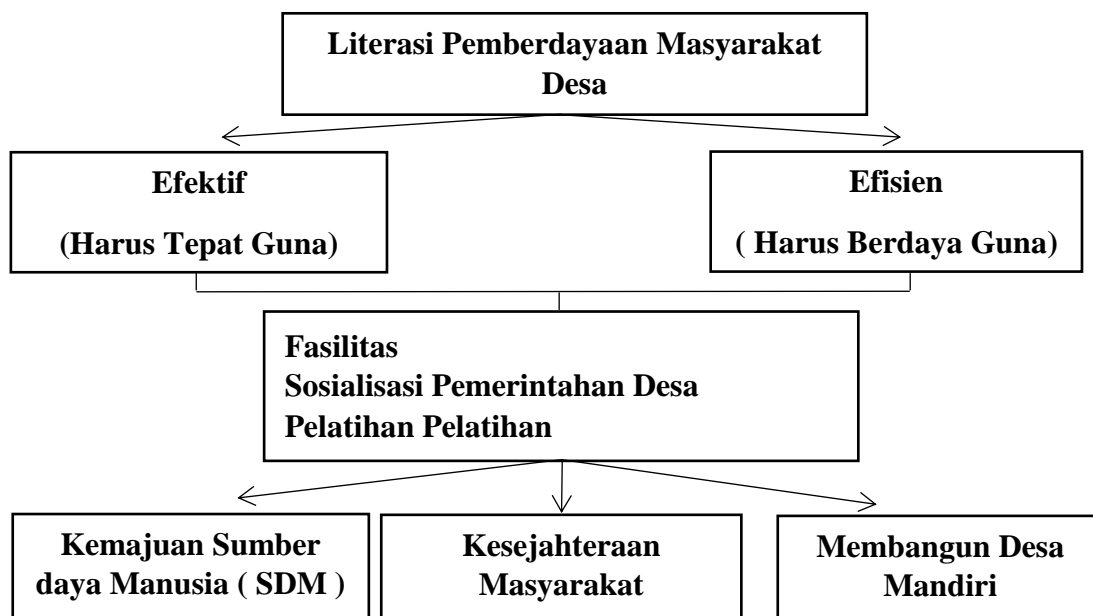
Menurut B.R.S. Parker mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai suatu tujuan tertentu, atau serangkaian tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah pada waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subjek atau respon terhadap suatu keadaan krisis. Maksud definisi ini bahwa, kebijakan pemerintah itu mempunyai ukuran (asas) dari tindakan tertentu dalam suatu waktu tertentu pula untuk menjawab dan memecahkan masalah atas keadaan kritis yang dihadapi masyarakat. Salah satu contoh

⁷ Nelli Fitri Khumaidi.skripsi: ' pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di desa tamangede kecamatan gemuh kabupaten Kendal.(universitas negeri semaran.2020)hlm.10

seperti : pemerintah membangun rumah-rumah murah (sederhana) bagi masyarakat yang berpendapatan rendah yang belum memiliki rumah sendiri di seluruh daerah, secara umum muncul sebuah definisi mengenai kebijakan pemerintahan adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya.⁸

E. Kerangka Konsep

Menurut Notoatmodjo, kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur maupun diamati dalam suatu penelitian. Sebuah kerangka konsep haruslah dapat memperlihatkan hubungan antara sub-sub yang akan diteliti. Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Gambar 1.pengaruh literasi pemberdayaan masyarakat desa

⁸ administrasi fisip. Bahan ajar kebijakan pemerintahan.2019.hal.6

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif adalah untuk menggambarkan secara jelas keberhasilan pelaksanaan program berdasarkan proses dan hasil yang dicapai.

2. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di desa pangkalan lunang kecamatan kualuh leidong kabupaten labuhanbatu utara.

3. Informan penelitian

fungsi dari informan dalam penelitian ini adalah memberikan informasi terkait dengan realitas dan kondisi yang menjadi latar belakang dalam rumusan masalah penelitian Informan dalam penelitian ini terbagi atas 3 kelompok, yaitu sebagai berikut:

a. Informan kunci

Yaitu seseorang yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang proses dan hasil yang dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena yang terjadi secara garis besar, tetapi juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam penelitian ini informan kuncinya adalah: kasi (kepala seksi) kesejahteraan pangkalan lunang kecamatan kualuh leidong Kabupaten labuhanbatu utara.

b. Informan utama

Yaitu seseorang yang mengetahui secara teknis dan detail serta terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini informan utama adalah kepala desa dan ketua BPD desa pangkalan lunang kecamatan kualuh leidong kabupaten labuhanbatu utara.

c. Informan Tambahan

Yaitu seseorang yang dapat memberikan informasi tambahan atau informasi sekunder tentang proses dan hasil yang dicapai sebagai pelengkap dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini informan tambahannya adalah: masyarakat Desa pangkalan lunang kecamatan kualuh leidong Kabupaten Labuhanbatu utara.

Tabel 1.
Data Informan Penelitian

No	Nama	Kelompok informan	Keterangan	No
1	M. AMRI NASUTION	Kunci	Kasi (Kepala Seksi) Kesejahteraan Desa Pangkal Lunang	A1
2	PJ. SUJANTO	Utama	Kepala Desa Pangkal lunang	B1
3	M. TAUFIK AMRULLAH	Utama	Ketua BPD Desa Pangkalan Lunang	B2
4	TRIANI,SURATMI, EVA DAN LEO	Tambahan	Masyarakat Desa	C1

Sumber: Purposive Sampling

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan dalam penelitian berfungsi mengumpulkan data dan informasi yang berguna untuk menjelaskan isi dari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik pengumpulan data secara:

a. Data primer : yaitu peneliti mendapatkan secara langsung data yang diambil dari objek penelitian yang dilakukan melalui observasi (Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol fakta dan validnya informasi, wawancara , dokumen, dokumentasi.

b. Data sekunder : yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber nya atau objek penelitian, dengan kata peneliti lain mendapatkan data melalui buku, jurnal dan beberapa sumber lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika penulisan ini peneliti bagi dalam V (LIMA) BAB, yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Uraian Teoritis

Berisi definisi tentang uraian penjelasan teori yang dipakai dalam menyusun skripsi yang berjudul literasi pemberdayaan masyarakat melalui program kerja administrasi pemerintahan desa pangkalan lunang kecamatan kualuh leidong Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2022 berdasarkan penyusunan data yang digunakan.

BAB III: Deskripsi Lokasi Penelitian

Berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian yang dilakukan di desa pangkalan lunang kecamatan kualuh leidong Kabupaten Labuhan batu utara.

BAB IV: Analisis Hasil Penelitian

Menguraikan hasil penelitian berupa penyajian data berdasarkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi dan dokumen, yang mendukung pemikiran peneliti.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Menguraikan kesimpulan yang ditarik setelah melakukan penelitian serta saran yang membangun agar penelitian yang dilakukan dapat lebih baik lagi.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Literasi

Sulzby menyebutkan Literasi adalah kemampuan berbahasa seseorang (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Pentingnya kesadaran literasi sangat mendukung keberhasilan seseorang dalam menghadapi berbagai permasalahan, literasi memiliki tingkatan dan pemahaman yang beragam yaitu: menunjukkan kemampuan menggunakan bahasa untuk tujuan hidup atau keterampilan untuk bertahan hidup, menunjukkan kemampuan untuk mengakses pengetahuan, dan menunjukkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan. Literasi menjadikan manusia berfungsi maksimal dalam bermasyarakat.

Kemampuan dan keberanian untuk memecahkan masalah melalui kegiatan berpikir kritis dan berbudaya. Masyarakat yang berbudaya adalah masyarakat yang menanamkan nilai-nilai positif sebagai upaya menggunakan kemampuan dirinya terbentuk melalui pemikiran yang berarti aktivitas menemukan dan membangun makna hidup. Hal ini dapat dicapai melalui penguasaan literasi yang baik. Literasi sangat penting didalam masyarakat karena mampu menambah wawasan, kecerdasan, serta keahlian untuk menjalankan dan mengembangkan kehidupannya.

Dengan adanya literasi maka masyarakat mampu mensejahterakan dan merumuskan program-program untuk pembangunan desa. Bukan hanya masyarakat tetapi pemerintahan desa juga terlibat dalam menjalankan literasi melalui media membaca, sosialisasi yang diadakan pemerintahan desa, fasilitas teknologi, dan pelatihan-pelatihan untuk menambah kemampuan masyarakat.⁹

B. Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya untuk memenuhi keinginan dan aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang berkaitan dengan pekerjaannya, juga aktivitas sosialnya, Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kearah yang lebih sejahtera.¹⁰

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas. Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam

⁹ pemberdayaan masyarakat melalui gerakan literasi taman baca masyarakat (tbn) multi raden intan, 2016), Hal.

¹⁰ Totok mardikanto dan poerwoko soebiato, pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik, Bandung: Alfabeta, 2012. hlm. 27.

berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar.¹¹

Menurut sumadyo ada tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya sebagai Tri Bina yaitu : Bina Manusia, Bina Usaha, Dan Bina Lingkungan. Terhadap rumusan yang dikemukakan ini, mardikanto menambahkan bahwa ketiga pokok ini saja tidak cukup oleh karena itu harus ada nya Bina Kelembagaan dengan begitu barulah akan terwujud seperti yang diharapkan, apabila didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan.

Berikut penjelasan dari Tri Bina yaitu :

1. Bina Manusia

Bina Manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Dalam bina manusia harusnya ada pengembangan kapasitas individu dimana setiap individu harusnya diberikan pelatihan-pelatihan yang mampu mengembangkan potensi diri masing-masing.

2. Bina Usaha

Bina Usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab Bina Usaha yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan

¹¹ Drs.Almasri,M.Si Dan Devi Deswimar, S.Sos, M.Si,"PERAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN" , vol 5 no 1 (2014),hal.42

ekonomi akan membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, dan apabila bina usaha ini berhasil maka akan banyak memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat sehingga mampu memperbaiki perekonomian masyarakat.

3. Bina Lingkungan

Selama ini pengertian lingkungan sering kali dimaknai sekedar lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tetapi, dalam praktek nya perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan kehidupan. Pemberdayaan dalam hal ini berupa kegiatan usaha maupun kegiatan untuk kesejahteraan hidup orang banyak, pemberdayaan membutuhkan faktor lingkungan baik alam maupun sosial. Lingkungan alam menjadi pemasok sumber daya alam yang akan diproses lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan lingkungan sosial menyediakan sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan.

4. Bina Kelembagaan

Efektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Bina kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga yang dibutuhkan, namun jauh lebih penting dari pembentukannya adalah seberapa jauh kelembagaan yang telah terbentuk tersebut mampu berfungsi secara efektif.¹²

¹² Totok mardikanto dan poerwoko soebiato, pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik, Bandung: Alfabeta, 2012. hlm 113-116.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang terbagi menjadi 5 yaitu:

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekar-sekar kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus

mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

C. Program Kerja Administrasi Dan Kebijakan Pemerintahan Desa

Administrasi dapat diartikan dalam dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan yang meliputi mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. administrasi pemerintahan desa dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa.¹³

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi pemerintahan desa merupakan arti sempit dari pengertian administrasi. ruang lingkup administrasi pemerintahan desa dibagi menjadi lima, yaitu administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya. kelima administrasi tersebut, memiliki fungsi dan cakupannya masing-masing. Administrasi umum merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pemerintahan desa dimuat dalam administrasi umum. Administrasi umum memiliki beberapa bentuk, yaitu :Buku Peraturan di Desa, Buku Keputusan Kepala Desa, Buku Inventaris dan Kekayaan Desa, Buku Aparat Pemerintah Desa,

¹³ Edi Suharto, Ph.D, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2005), cet ke-1, h.67

Buku Tanah Kas Desa, Buku Tanah di Desa, Buku Agenda, Buku Ekspedisi, Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa. Nurasa berpendapat bahwa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui reformasi administrasi dapat dilakukan melalui pengenalan pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik. Administrasi pemerintahan desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dimana administrasi berpengaruh terhadap kelancaran jalannya pemerintahan desa.¹⁴

Administrasi pemerintahan desa memiliki susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepekat bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara terarah, sebab akan menjadi landasan dalam mencapai tujuan. Dan selain itu program kerja sendiri juga dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target apakah membawa dampak baik untuk masyarakat, dan hasilnya akan di evaluasi pada masa akhir kepengurusan. Sama seperti hal nya administrasi pemberdayaan tidak selalu dibatasi oleh peraturan-peraturan dari pusat yang terlalu formal, karena hal ini sering kali menjadikan masyarakat tidak memperoleh keleluasaan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.¹⁵

Maka dari itu pemerintahan desa harusnya membuat kebijakan agar mampu memberikan keputusan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Menurut B. R. S. Parker kebijakan pemerintahan adalah serangkaian tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah pada waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subjek atau

¹⁴ Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Tamangede, 2020, Hal.2-18

¹⁵ Totok mardikanto dan poerwoko soebiato, pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik, Bandung: Alfabeta, 2012. hlm 104

respons terhadap suatu keadaan krisis. Maksud definisi ini bahwa, kebijakan pemerintah itu mempunyai ukuran dari tindakan tertentu dalam suatu waktu tertentu pula untuk menjawab/memecahkan masalah atas keadaan kritis yang dihadapi masyarakat. Salah satu contoh seperti ; pemerintah memberikan fasilitas pelatihan bagi masyarakat agar memiliki keahlian yang membawa dampak bagi kehidupan dilingkungan masyarakat.

Secara umum definisi kebijakan pemerintahan adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah atau negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya. Dengan begitu harusnya permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat bisa teratasi dengan adanya kebijakan pemerintahan desa ini. sehingga mampu membawa masyarakat hidup tentram dan damai serta menuju desa yang mandiri serta masyarakat terberdayakan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan desa.

Jika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa malah bertentangan dengan masyarakat dan tidak bermanfaat bagi kehidupan masyarakat artinya pemerintahan desa gagal dalam membuat kebijakan pemerintahan desa yang berjalan serta berdampak bagi keberlangsungan kehidupan dan program yang ada dimasyarakat, dengan begitu dalam membuat kebijakan haruslah sesuai dengan pedoman dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat dan desa agar program kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintahan desa berhasil guna untuk kehidupan masyarakat Desa.¹⁶

¹⁶Buku Ajar Bagi Mahasiswa Semester VII 2012-2013 Prodi Ilmu Pemerintahan.(Ambon: Universitas Pattimura.2012),hal.6